

2019

LAPORAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019



SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR (526771)
JL. RAYA PENDIDIKAN NO. 1 , Telp. (0411) 868784



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahiim

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga dapat menyelesaikan laporan kegiatan 2019 ini.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta umat yang selalu setia di akhir zaman.

Maksud penyusunan laporan kegiatan ini adalah memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Penyusunan Laporan kegiatan 2019. Adapun materi laporan ini didasarkan atas Outline Pelaporan Tahunan yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI, terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut : Bab I Pendahuluan, Bab II Struktur Organisasi, Bab III Pembinaan dan Pengelolaan, Bab IV Pengawasan, Bab V Kesimpulan dan Penutup. Selain itu diharapkan laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pedoman kegiatan di tahun mendatang.

Atas tersusunnya laporan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun, serta kepada seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, termasuk para hakim, para pejabat struktural/fungsional dan seluruh staf baik Kesekretariatan maupun Kepaniteraan yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan kegiatan ini.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari

kesempurnaan oleh karena itu kami mohon saran dan kritik yang membangun demi tersusunnya laporan kegiatan yang akan datang.

Makassar, 02 Januari 2020

Ketua



LAMRES SARAAN, SH.,MH
NIP. 196408161991031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II.....	4
A. Keadaan Perkara Sewilayah Hukum PTUN Makassar	4
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	4
2. Keadaan Perkara Pada Tingkat Banding	4
3. Keadaan Perkara pada Tingkat kasasi	4
4. Keadaan Perkara pada Tingkat Peninjauan Kembali.....	4
B. Penyelesaian Perkara	5
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.....	5
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	6
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK.	6
C. Pelayanan Publik Yang Prima	9
- Akreditasi Penjaminan Mutu (sertifikat ISO Pengadilan).....	9
- Posbakum (Satker yang mendapatkan alokasi dan realisasi anggaran)....	9
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	10
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	11
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN.....	12
A. Struktur Organisasi.....	12

- Standar Operasional Prosedur (SOP)	13
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	14
B. Sumber Daya Manusia	16
- Mutasi	22
- Promosi.....	22
- Pensiun	23
- Diklat	23
C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	26
D. Pengelolaan Keuangan	31
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP	33
- Publikasi Perkara (One Day One Publish)	34
F. Regulasi Tahun 2019	35
BAB IV PENGAWASAN	39
A. Internal.....	39
B. Evaluasi	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Dinamika tuntutan masyarakat, perkembangan intelektual, kemajuan komunikasi, teknologi informasi, dan semakin terbukanya demokrasi, menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh aparatur negara. Sebagai pelayan masyarakat sudah seharusnya melakukan gerakan reformasi birokrasi. Karena tanpa adanya reformasi birokrasi maka aparatur Negara tidak akan pernah bisa mewujudkan tujuan Nasional dan akan mengalami keterpurukan dan keterbelakangan dengan Negara lain.

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Mahkamah Agung RI salah satu lembaga tinggi Negara yang berperan dibidang Yudikatif yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat menciptakan citra perbaikan dimata masyarakat.

Dalam mewujudkan lembaga yang professional, Mahkamah Agung menyusun Rencana Strategis sebagai suatu kebijakan yang tercetak dalam blue print. Berpedoman pada kebijakan rencana strategis Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Institusi Peradilan Tingkat Pertama mengikuti garis kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh

Mahkamah Agung RI dalam menentukan kebijakan umum peradilan dan menyusun rencana strategis 2015-2019 yang setiap tahunnya tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan.

B. Visi dan Misi

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

C. Rencana Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi , Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengambil langkah langkah kebijakan yang dituangkan dalam rencana startegi hal ini dimaksudkan agar dengan rencana strategis maka implentasi target serta output yang diinginkan tercapai. Salah satu output yang diinginkan adalah perubahan pola pikir sumber daya manusia serta pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. Sehingga dengan berubahnya pola pikir dalam melaksanakan kerja maka kualitas sumber daya aparatur peradilan akan meningkat sehingga berimbas pada pelayanan publik masyarakat pencari

keadilan. Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah dibuat sejak tahun 2009, Rencana Strategis 2015 - 2019 sudah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kerja untuk tahun 2019.

Adapun Indikator Kinerja Utama Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tahun 2015 - 2019 Revisi tahun 2019 tersebut sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

BAB II

A. Keadaan Perkara Sewilayah Hukum PTUN Makassar

Keadaan Perkara sewilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar meliputi perkara yang diterima sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

No	Satuan Kerja	Masuk	Sisa	Jumlah
1	PTUN MAKASSAR	145	44	189

2. Keadaan Perkara Pada Tingkat Banding

No	Satuan Kerja	Jumlah
1	PTUN MAKASSAR	53

3. Keadaan Perkara pada Tingkat kasasi

No	Satuan Kerja	Jumlah
1	PTUN MAKASSAR	38

4. Keadaan Perkara pada Tingkat Peninjauan Kembali

No	Satuan Kerja	Jumlah
1	PTUN MAKASSAR	8

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

a) Perkara

Penyelesaian perkara tahun 2019 adalah meliputi sisa perkara tahun lalu (2018) ditambah dengan perkara yang diterima sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Selama tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menerima 145 perkara, terdiri dari 139 perkara gugatan dan terdapat 5 perkara permohonan. Adapun sisa perkara tahun 2018 sebanyak 35 perkara. Sehingga jumlah perkara yang ditangani tahun 2019 sebanyak 144 perkara.

Perkara Sisa Tahun 2018	Perkara Masuk Tahun 2019	Jumlah Perkara Tahun 2019
35	145	145

Dari jumlah perkara yang masuk, ternyata perkara yang terbanyak adalah klasifikasi perkara Kepegawaian yang mencapai 65 perkara. Di urutan kedua terbanyak adalah Pertanahan sebanyak 50 perkara, dan klasifikasi perkara Lain-lain sebanyak 20 perkara, Perkara Perijinan sebanyak 2 perkara, selanjutnya diurutan berikutnya terdapat perkara lelang sebanyak 2 perkara, dan Perkara Tender sebanyak 1 perkara. Perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 115 perkara sehingga pada akhir Desember 2019 terdapat sisa perkara sebanyak 65 perkara.

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

a) Minutasi

Minutasi telah diupayakan secara maksimal agar tepat waktu, yaitu tidak melampaui 14 hari sejak perkara diputus, bahkan sejak persiapan untuk mendapatkan ISO diterapkan One Day Minutering dan One Day Publish sejak diputus. Dari seluruh perkara putus tahun 2019 (115 perkara), telah berhasil diminutasi sampai pada akhir Desember 2019 sebanyak 115 perkara , sehingga sisa perkara yang belum diminutasi sebanyak 0 perkara.

Perkara Putus Tahun 2019	Perkara yang di Minutasi	Perkara yang belum di Minutasi
115	115	0

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK.

a) banding

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan upaya hukum Banding pada tahun 2019 sebanyak 53 perkara dan yang telah dikirim berkasnya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebanyak 40 perkara dan sisanya sebanyak 13 perkara dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Sepanjang tahun 2019 perkara Banding dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Usaha Negara Makassar sampai akhir tahun 2019 sebanyak 61 perkara,

kemudian pada akhir tahun 2019 jumlah putusan Banding yang telah diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebanyak 50 Perkara.

Perkara Banding yang dimohonkan Tahun 2019	Perkara Banding yang dikirim Tahun 2019	Perkara Banding dalam proses Tk. I	Perkara Banding yang di putus Tahun 2019	Perkara Banding yang telah dikirim kembali ke Tk. I
53	40	13	61	50

b) Kasasi :

Permohonan Kasasi yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 38 perkara dan dari seluruh perkara yang dimohonkan Kasasi tersebut sampai akhir tahun 2019 telah terkirim ke Mahkamah Agung sebanyak 39 perkara dan sisanya sebanyak 16 perkara dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Sepanjang tahun 2019 perkara Kasasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah diputus oleh Mahkamah Agung sampai akhir tahun 2019 sebanyak 31 perkara, kemudian pada akhir tahun 2019 jumlah putusan Kasasi yang telah diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebanyak 28 Perkara.

Perkara Kasasi yang dimohonkan Tahun 2019	Perkara Kasasi yang di dikirim Tahun 2019	Perkara Kasasi dalam proses Tk. I	Perkara Kasasi yang di putus Tahun 2019	Perkara Kasasi yang telah dikirim kembali ke Tk. I
38	39	16	31	28

c) Peninjauan Kembali (PK) :

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diterima pada

tahun 2019 sebanyak 8 perkara. Dan dari seluruh perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) tersebut sampai akhir tahun 2019 telah terkirim 10 perkara dan sisanya sebanyak 4 perkara dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Sepanjang tahun 2019 perkara Peninjauan Kembali (PK) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah diputus oleh Mahkamah Agung sampai akhir tahun 2019 sebanyak 5 perkara, kemudian sampai dengan akhir tahun 2019 putusan Peninjauan Kembali (PK) yang telah diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebanyak 8 perkara.

Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan Tahun 2019	Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang di dikirim Tahun 2019	Perkara Peninjauan Kembali (PK) dalam proses Tk. I	Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang di putus Tahun 2019	Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang telah dikirim kembali ke Tk. I
8	10	3	4	8

d) Eksekusi

Pada tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Terdapat

12 perkara permohonan eksekusi.

Sehingga Rekapitulasi Perkara Tahunan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tahun 2019 adalah :

No	Satuan Kerja	Sisa Thn Lalu	Masuk	Cabut	Putus	Sisa	Permohonan			
							Banding	Kasasi	PK	Eksekusi
1	PTUN MAKASSAR	44	145	29	87	73	40	39	8	12

C. Pelayanan Publik Yang Prima

- Akreditasi Penjaminan Mutu (sertifikat ISO Pengadilan)

Perjalanan pelaksanaan ISO 9001:2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diawali dengan adanya sosialisasi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang kemudian dibentuk tim untuk peraihan ISO ISO 9001:2015 kemudian diajukan permohonan perencanaan anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA-RI, saat ini pelaksanaan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 telah berhasil dilaksanakan.

- Posbakum (Satker yang mendapatkan alokasi dan realisasi anggaran)

Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum Yang Diberikan Oleh Pemberi Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum Adalah Orang Atau Kelompok Orang Miskin. Pemberi Bantuan Hukum Adalah Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Memberi Layanan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang.

Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Melayani :

1. Pemberian Informasi, Dokumen, Konsultasi, Dan Advice Hukum Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan
2. Pemberian Bantuan Hukum Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
3. Penjamin Dan Pemenuhan Hak Bagi Penerima Bantuan Hukum Untuk

- Mendapatkan Akses Keadilan Secara Profesional;
4. Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara;
 5. Melayani Beracara Cuma-Cuma / Prodeo.

Kegiatan Pelaksanaan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah dilaksanakan sejak tahun 2015 sampai sekarang. Anggaran Posbakum tahun 2019 sebesar Rp.31.800.000 dengan realisasi sebesar Rp.31.135.000 atau 97,91 %.

Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi Anggaran)

No	Satker	Pagu	Realisasi
1	PTUN Makassar	31.800.000	31.135.000

- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Manfaat Sidang Keliling

1. Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara
2. Biaya transportasi lebih ringan
3. Menghemat waktu

Sidang keliling / Pelayanan Terpadu

No	Satker	Pelaksanaan Sidang Keliling
1	PTUN Makassar	Tidak Ada Sidang Keliling

Untuk saat ini, sidang keliling tidak tersedia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

- **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Prodeo adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Anggaran layanan prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tahun 2019 sebesar Rp.600.000 dengan realisasi sebesar Rp.0. hal ini disebabkan karena tidak ada masyarakat yang mengajukan perkara prodeo.

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

No	Satker	Perkara Prodeo
1	PTUN Makassar	Tidak Ada Perkara Prodeo

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Struktur Organisasi

Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi/Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan PERMA Nomor 7 tahun 2015 terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

1. Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim Anggota adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dibantu oleh seorang 2 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Perkara. Disamping itu, Panitera dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Juru Sita Pengganti.

5. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag yaitu Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Umum dan Keuangan, dan Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

- **Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Pada prinsipnya, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2010, yaitu melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Di dalam pelaksanaannya, tugas pokok dan fungsi aparaturnya mencakup tugas di bidang yustisial dan non yustisial.

Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dimaksudkan untuk memberikan instruksi secara tertulis mengenai aktivitas rutin yang dilakukan secara berulang dalam suatu organisasi. Sehingga dengan SOP dapat diukur berhasil tidaknya suatu kegiatan operasional dan dapat menjaga konsistensi kegiatan operasional dari awal hingga akhir. Sehingga akan tercapai sasaran mutu yang diinginkan suatu organisasi.

Dasar dari pembuatan SOP pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar yaitu Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 tahun 2012 serta SOP yang sudah dibuat standar nasional oleh Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

Sampai saat ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah membuat SOP akan tetapi masih dikaji ulang secara terus menerus. Pertengahan tahun 2018 dilakukan revisi SOP oleh Tim Persiapan Perolehan ISO pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan sudah diimplementasikan oleh pegawai dan didaftarkan sebagai SOP yang sudah siap untuk mempunyai standar ISO oleh Badan Sertifikasi Internasional. Adapun SOP Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sudah dilakukan revisi tahun 2017 dan telah didaftarkan pada lembaga ISO adalah sebagai berikut :

1. Untuk SOP setingkat eselon II berjumlah 43 (empat puluh tiga) SOP.
2. Untuk SOP eselon III berjumlah 56 (lima puluh enam) SOP
3. Untuk SOP eselon IV berjumlah 74 (tujuh puluh empat) SOP
4. Untuk SOP Fungsional Hakim berjumlah 9 (sembilan) SOP
5. Untuk SOP Fungsional PP berjumlah 10 (sepuluh) SOP
6. Untuk SOP Fungsional Jurusita/ Jurusita Pengganti berjumlah 6 (enam) SOP

Daftar dan rincian standar operating prosedur Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebagai berikut sebagaimana terdapat dalam lampiran.

- **Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)**

Amanat Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib mencapai sasaran kerja pegawai yang telah disepakati bersama serta untuk membangun perilaku kerja yang produktif maka perlu dibuatkan Sasaran Kinerja Pegawai setiap tahunnya. Sasaran kinerja pegawai ini merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Sehingga dapat dilakukan penilaian prestasi kerja terhadap pegawai.

Latar belakang terbitnya kebijakan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil yaitu PP No. 46 tahun 2011 dan Perka BKN No.1 Th.2013. Serta UU No.8 tahun 1974 jo UU No.43 th 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian. Bahwa Kedudukan PNS sangat strategis karena PNS sebagai pemikir, perencana dan sekaligus pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan sehingga diperlukan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Implementasi pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah dilaksanakan sejak awal tahun 2019, bahwa setiap pegawai sudah membuat SKP sesuai dengan tugas pokok masing-masing dan telah terjadi kesepakatan antara pegawai yang dinilai dan pejabat penilai mengenai target/ kinerja yang harus dilaksanakan dalam satu tahun.

Adapun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebagai berikut :

1. Untuk Eselon II jumlah SKP yaitu 43 SKP
2. Untuk Eselon III jumlah SKP yaitu 56 SKP
3. Untuk Eselon IV jumlah SKP yaitu 74 SKP
4. Untuk Fungsional Hakim jumlah SKP yaitu 9 SKP.
5. Untuk Fungsional Panitera Pengganti jumlah SKP yaitu 10 SKP
6. Untuk Fungsional Juru Sita Pengganti jumlah SKP yaitu 6 SKP

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama suatu organisasi yang harus mendapat perhatian utama, karena termasuk bagian dari penentu keberhasilan organisasi. Oleh karena itu melalui program Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan salah satu program Quick Wins Mahkamah Agung, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan dan profesionalisme aparatur hukum sehingga bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tahun 2019 sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Kondisi pegawai di bidang teknis yudisial pada akhir tahun 2019 seluruhnya berjumlah sebanyak 31 (tiga Puluh Satu) orang yang terdiri dari Ketua, 12 (dua belas) orang hakim, Wakil Panitera sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda sebanyak 2 (dua) orang, Panitera Pengganti sebanyak 9 (Sembilan) orang, Juru Sita Pengganti sebanyak 6 (enam) orang.

Berikut daftar Pegawai dibidang tekhnis yusdisial ditinjau dari pangkat/

golongan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin :

- Hakim

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN	J.K
1	JAMRES SARAAN, SH. MH. NIP. 196408161991031003	Pembina Utama Madya IV/d	Strata 2 (S.2)	L
2	SUGIYANTO, SH,MH. NIP. 19700906 199103 1 005	Hakim Madya Pratama IV/a	Strata 2 (S.2)	L
3	BUDI HARTONO, SH NIP. 1969030 199503 1 002	Hakim Madya Pratama IV/a	Strata 1 (S.1)	L
4	BAMBANG SOEBIYANTORO, SH. MH NIP. 19771102 200112 1 002	Hakim Madya Pratama IV/a	Strata 2 (S.2)	L
5	HENDRY TOHONAN SIMAMORA, SH. NIP. 197411132005021001	Hakim Pratama Utama III/d	Strata 1 (S.1)	L
6	SRI LISTIANI, SH.M.Kn NIP. 19750711 200502 2 002	Hakim Pratama Utama III/d	Strata 2 (S.2)	P
7	JOSIANO LEO HALIWELA, SH NIP. 197512302005021001	Hakim Pratama Utama III/d	Strata 1 (S.1)	L
8	YULIANT PRAJAGHUPTA, SH NIP. 197807202005021002	Hakim Pratama Utama III/d	Strata 1 (S.1)	L
9	MUHAMMAD IQBAL M., SH NIP. 19770428 200604 1 002	Hakim Pratama Utama III/d	Strata 1 (S.1)	L
10	DIKDIK SOMANTRI,SH. S.IP., MH. NIP. 197302272006041001	Hakim Pratama Utama III/d	Strata 2 (S.2)	L
11	M. HERRY INDRAWAN PATIRADJA, S.Sos. SH. MH. NIP. 19780708 200805 1 001	Hakim Pratama Utama III/d	Strata 2 (S.2)	L
12	M. NOOR HALIM PERDANA, SH.MH NIP. 19830410 200704 1 001	Hakim Pratama Madya III/c	Strata 2 (S.2)	L
13	SUDARTI KADIR, SH. NIP. 19811102 200805 2 001	Hakim Pratama Madya III/c	Strata 1 (S.1)	P

- Panitera dan Panitera Pengganti

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN	J.K
1	ANDI MAPPANYUKKI, SH. NIP. 196112311986031032	Pembina IV/a	Strata 1 (S.1)	L
2	SULTHAN, SH, MH NIP.196812081991031007	Penata Tingkat I III/d	Strata 1 (S.1)	L
3	ANDI HASANUDDIN, SH.,MH. NIP. 196608311989031001	Pembina IV/a	Strata 2 (S.2)	L

4	MAKKULAWANG, SH NIP. 196412311991031068	Penata Tingkat I III/d	Strata 1 (S.1)	L
5	Drs.H.M.HARIPAI,SH. NIP. 196111101993031004	Penata Tingkat I III/d	Strata 1 (S.1)	L
6	H.USMAN DAENG MATTOLA, SH. NIP. 196305101991031003	Penata Tingkat I III/d	Strata 1 (S.1)	L
7	BUDI HENDRA WIDAGDO, SH NIP. 196809041996031002	Penata Tingkat I III/d	Strata 1 (S.1)	L
8	JASMAN, SH NIP. 197212311994031008	Penata Tingkat I III/d	Strata 1 (S.1)	L
9	BURHAN, SH. NIP. 196912311993031024	Penata Tingkat I III/d	Strata 1 (S.1)	L
10	ASGEM JAYA, SH. NIP. 197012301996031001	Penata III/c	Strata 1 (S.1)	L
11	ABIDIN SANDIRI, SH. NIP. 196910021992031002	Penata III/c	Strata 1 (S.1)	L
12	YULIUS DASE, S H . 197202281991031001	Penata Muda Tingkat I III/b	Strata 1 (S.1)	L

- Juru Sita Pengganti

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN	J.K
1	MUH ARFA NIP. 196310051991031007	Penata Muda Tingkat I III/b	SMA	L
2	AMIR NIP. 196411111993031003	Penata Muda Tingkat I III/b	SMA	L
3	BASRI NIP. 196701291993031002	Penata Muda Tingkat I III/b	SMA	L
4	ABDUL RASYID NIP. 196903151993031001	Penata Muda III/a	SMA	L
5	MUH. FAIRUZ FIRMANULLAH NIP. 196906161992031001	Penata Muda III/a	SMA	L
6	ABDUL RAZAK NIP. 196907151991031003	Penata Muda Tingkat I III/b	SMA	L

- Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial

Kondisi pegawai di bidang teknis non yudisial pada akhir tahun 2019 di
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar seluruhnya berjumlah 21 (dua puluh

satu) orang yang terdiri dari Sekretaris, 3 (tiga) orang Ka. Sub Bagian, 6 (enam) orang Staf Kesekretariatan dan tidak ada Staf Kepaniteraan serta 11 (sebelas) orang Tenaga Honorer.

Berikut daftar Pegawai dibidang teknis non yusdisial ditinjau dari pangkat/ golongan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin :

- Sekretaris dan Ka.Sub. Bag & Staf

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN	J.K
1	SRI MULIATI, S.Sos.,MH. NIP. 197108261991032002	Pembina IV/a	Strata 2 (S.2)	P
2	NURHASMAWATI HASIKIN, SE. NIP. 196907011992032001	Penata Tingkat I III/d	Strata 1 (S.1)	P
3	ARIYANTO NIP. 196907111991031003	Penata Tingkat I III/d	SMA	L
4	ANDI ADZAN MIRZAN, S. KOM NIP. 198503092009041001	Penata III/c	Strata 1 (S.1)	L
5	AMRI, S.Kom NIP. 198304012009041003	Penata III/c	Strata 1 (S.1)	L
6	SALMIAH NIP. 196804291992032002	Penata Muda Tingkat I III/b	SMA	P
7	LISA LUSIANA FARIDA, SH NIP. 198310102011012015	Penata Muda Tingkat I III/b	Strata 1 (S.1)	P
8	NURFAIDAH BANGSAWAN, SE. NIP. 198703092011012018	Penata Muda Tingkat I III/b	Strata 1 (S.1)	P
9	DWI PUTRI HANDAYANI, SH NIP. 198312202002122002	Penata Muda III/a	Strata 1 (S.1)	P
10	DEWI JUNI CAHYANTI NIP. 198312202002122002	Penata Muda III/a	Strata 1 (S.1)	P

- Tenaga Honorer

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN	J.K
1	Kaliktus Ganggas	Honorer	SMA	L
2	Andi Fitra, SH	Honorer	Strata 1 (S.1)	L

3	Farma, SH	Honorar	Strata 1 (S.1)	P
4	Muhammad Nasrullah, SE	Honorar	Strata 1 (S.1)	L
5	Abdul Gafur	Honorar	SMA	L
6	Muh. Ichsan Azis, SH	Honorar	Strata 1 (S.1)	L
7	Darmawati, Spd	Honorar	Strata 1 (S.1)	P
8	Kamsunardi Sudiyanto,SH	Honorar	Strata 1 (S.1)	L
9	Oktavianus Lasa	Honorar	SMA	L
10	Fahbi Fahreza, SH	Honorar	Strata 1 (S.1)	L
11	Andy Adrhyan Taufik, S.Kom	Honorar	Strata 1 (S.1)	L

- Kebutuhan Sumber Daya manusia

Melihat pada paparan profil sumber daya manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang jumlah pegawainya hanya 42 pegawai maka menurut analisa kami masih kekurangan jumlah pegawai. Apalagi jumlah perkara setiap tahun meningkat dan sampai akhir tahun 2019 sudah mencapai 145 perkara.

Menurut pola formasi pengadilan Tingkat Pertama yang terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I maka Pengadilan Tingkat Pertama Klas I.A terdiri dari maksimum 8 Majelis Hakim atau maksimum 24 orang hakim termasuk wakil ketua. Sedangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sampai tahun 2019 hanya mempunyai 13 Hakim termasuk Ketua, sehingga masih terdapat kekurangan

hakim sebanyak 11 orang. Sedangkan untuk Panitera Pengganti idealnya menurut KMA tersebut diatas bahwa setiap majelis hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti. Sementara Panitera Pengganti yang ada saat ini hanya 13 orang termasuk Panitera, Wakil Panitera dan 2 orang Panitera Muda . Sehingga apabila dalam satu majelis 4 orang Panitera Pengganti dan maksimum 8 majelis hakim maka jumlah panitera pengganti yang harus ada pada Pengadilan Tingkat Pertama maksimal 32 Panitera Pengganti. Apabila yang tersedia saat ini hanya 13 orang maka pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih terdapat kekurangan Panitera Pengganti sejumlah 19 panitera pengganti. Sedangkan untuk pelaksana / staf hanya ada satu orang staf. Untuk jabatan Fungsional Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah terpenuhi sejumlah 6 orang. Sementara untuk Pelaksana dibutuhkan 12 orang staf yang terdiri dari : 1 orang kasir, 1 orang bagian pendaftaran, 1 orang bagian register, 1 orang bagian meja informasi, 4 orang staf sub. bagian umum, dan keuangan, 2 orang sub.bagian kepegawaian. dan 2 staf sub. bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan. Sementara untuk saat ini pelaksana pada bagian tersebut diatas masih dilakukan rangkap tugas oleh panitera pengganti dan jurusita pengganti, sehingga beban tugas panitera pengganti dan jurusita pengganti sangat berat karena selain melaksanakan tugas pokok sesuai jabatannya, masih diberikan tugas tambahan dalam pelayanan.

Oleh karena itu mohon pertimbangan dari pimpinan Tingkat Banding ,
Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dan pimpinan Mahkamah

Agung RI untuk dapat merealisasikan kebutuhan jumlah pegawai di Pengadilan Tingkat Pertama khususnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Sehingga tidak terjadi rangkap tugas, dan pelaksanaan tugas pokok serta pelayanan masyarakat pencari keadilan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

- **Mutasi**

Pola mutasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tahun 2019, yaitu mutasi internal, mutasi keluar dan mutasi masuk baik struktural dan fungsional. Adapun kegiatan tersebut kami rincikan sebagai berikut :

a. Mutasi Internal

- Selama Periode tahun 2019 tidak ada yang mutasi Internal di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

b. Mutasi Keluar

- Selama Periode tahun 2019 tidak ada yang mutasi Keluar di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

c. Mutasi Masuk

- Dewi Juni Cahyati, SH CPNS Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

- **Promosi**

Pola Promosi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tahun 2019, yaitu promosi kenaikan pangkat dan promosi kenaikan gaji berkala, Adapun kegiatan tersebut kami rincikan sebagai berikut :

a. Promosi Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai per April 2019 :

Selama Periode tahun 2019 pegawai yang mendapatkan promosi kenaikan pangkat reguler berjumlah 5 (lima) Orang

b. Promosi Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai per Oktober 2019 :

Selama Periode tahun 2019 pegawai yang mendapatkan promosi kenaikan pangkat reguler berjumlah 3 (tiga) Orang

c. Promosi Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2019 :

Selama Periode tahun 2019 pegawai yang mendapatkan promosi Kenaikan Gaji berkala berjumlah 5 (lima) Orang

- **Pensiun**

Selama periode tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terdapat 2 (dua) pegawai Negeri Sipil yang purna bakti / pensiun atas nama Paharuddin, SH. Dan Darmawangsa,SH.

- **Diklat**

Sasaran peningkatan efektifitas kualitas sumber daya manusia (SDM) dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk meningkatkan kapabilitas dan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan dalam menyelenggarakan peradilan.

a. Persentase yang mengikuti diklat teknis yudisial

No.	Uraian	Jumlah	Lulus diklat
1	Pegawai Yang Ikut Diklat Teknis Yudisial	0 Orang	0 Orang

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pegawai yang lulus diklat	100%	100%	100%

Berikut daftar jumlah peserta dan jenis diklat yang diikuti oleh pegawai teknis yudisial di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

No.	Nama Diklat	Jumlah	Lulus	Keterangan
1	Diklat Bimbingan Teknis Peradilan	4	4	JAMRES SARAAN,SH.,MH. SUGIYANTO,SH.,MH. SRI LISTIANI,SH DIKDIK SOEMANTRI,SH.
2	Diklat Hakim Bimbingan Teknis	5	5	JAMRES SARAAN, SH.MH. SUGIYANTO,SH.,MH. YULIANT PRAJAGHUPTA, SH MOHAMMAD HERRY INDRAWAN P., S.Sos, SH,MH BAMBANG SOEBIYANTORO, SH.MH.
3	Diklat Bimbingan Teknis Yudisial	-	-	-
4	Diklat Ketatalaksanaan Perkara	-	-	-
5	Diklat Teknis Kepaniteraan	2	2	DARMAWANGSA, SH.,MH SULTHAN,SH
6	Diklat Teknis Fungsional Panitera	-	-	-

b. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknik Non Yudisial

Ukuran indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat non teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat non teknis yudisial.

Pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial

No.	Uraian	Jumlah	Lulus diklat
1	Pegawai Yang Ikut Diklat Non Teknis Yudisial	- Orang	- Orang

Persentase pegawai yang lulus diklat teknik yudisial

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Pegawai yang lulus diklat	100%	100%	100%

Berikut daftar jumlah peserta dan jenis diklat yang diikuti oleh pegawai non teknis yudisial di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

No.	Nama Diklat	Jumlah	Lulus	Keterangan
1	Diklat PIM III	-	-	-
2	Diklat PIIM IV	-	-	-
3	Diklat Sekretaris	-	-	-
4	Diklat Bendahara	2	2	LISA LUSIANA FARIDA, SH DWI PUTRI HANDAYANI, SH
5	Diklat Prajabatan CPNS K1 Gol III	1	1	DEWI JUNI CAHYATI,SH
6	Diklat Kuasa Pengguna Anggaran	1	1	SRI MULIATI,S.Sos.,MH
7	Diklat TOT SIPP	7	7	YULIANT PRAJAGHUPTA, SH BAMBANG SOEBIYANTORO, SH.MH. SRI LISTIANI,SH DIKDIK SOEMANTRI,SH. DARMAWANGSA, SH.,MH BASRI M.NASRULLAH
8	Diklat TI Pengelola Website	-	-	-
9	Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang	7	7	AMRI,S.Kom DWI PUTRI HANDAYANI,SH

C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Kesekretariatan sebagai supporting unit pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan adalah merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan. Karena salah satu tugasnya adalah mengelola sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik para pencari keadilan. Tahun demi tahun kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berusaha untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana walaupun masih belum mencapai maksimal. Akan tetapi ada perubahan kearah kebaikan dari tahun ke tahun. Sehingga pada tahun 2019 pengelolaan sarana dan prasarana diajukan untuk didaftarkan pengelolaannya dalam SOP yang sesuai standar ISO 9001:2015. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana bisa lebih meningkat dan penanganannya lebih dapat terukur karena dipantau menggunakan monitoring sasaran mutu. Adapun pengelolaan Sarana dan prasarana pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang terletak di Jalan Raya di Jalan Raya Pendidikan Kecamatan Rappocini Kelurahan Tamalate Kota Makassar Sulawesi Selatan, Telepon nomor 0411-868784, Fax : 0411- 868784, berdiri diatas tanah seluas 3500 M2 dengan status Tanah Hak Guna Pakai yang Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pengadaan tanahnya dilaksanakan tahun 1991. Luas bangunan gedung baru tersebut 2298 m2

terdiri dari dua lantai dan luas halamannya 1202 m2. Diresmikan pada 26 Desember 1992 oleh Menteri Kehakiman RI Bapak Ismail Saleh, SH.

Sarana dan Prasarana Gedung

No	Satker	Luas Gedung	Luas Halaman	Luas Pagar
1	PTUN Makassar	1.803	1.697	242

Adapun penggunaan ruangan dari lantai I sampai dengan lantai II sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

a. Penggunaan ruangan lantai I

- Ruang Ketua.
- Ruang Wakil Ketua.
- Ruang Panitera.
- Ruang Rapat.
- Ruang Hakim I.
- Ruang Hakim II.
- Ruang Kepaniteraan Muda Perkara.
- Ruang Kepaniteraan Muda Hukum.
- Ruang Sekretaris.
- Ruang Wakil Panitera.
- Ruang. Umum dan Keuangan.
- Ruang. Kepegawaian.
- Ruang. IT dan Perencanaan.
- Ruang kasir dan pendaftaran.
- Ruang Register.
- Ruang Arsip.
- Ruang Perpustakaan
- Ruang Alat Tulis Kantor (ATK).
- Ruang Sidang Utama.
- Ruang Sidang II.
- Ruang Tunggu Lantai 1 (lobby).
- Ruang Musholla.
- Ruang Dapur.
- Tempat Wudhu.
- Ruangan Posbakum
- Toilet Pria dan Wanita

- Smoking Area
- Pos Satpam
- b. Penggunaan Ruang lantai II
 - Ruang Panitera Pengganti
 - Toilet Pria dan Wanita

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a) Pengelolaan sarana, prasarana dan fasilitas gedung.

Pengelolaan sarana, prasarana dan fasilitas gedung meliputi pemeliharaan dan penghapusan barang milik negara berupa peralatan, perlengkapan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin meliputi kendaraan dinas bermotor, alat rumah tangga dan alat kantor, serta barang bergerak lainnya. Sedangkan aset tetap lainnya mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan kelompok tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan serta kondisi siap pakai.

b) Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas gedung.

Pengadaan Sarana Fasilitas Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tahun 2019, kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mendapat anggaran sebesar Rp. 78.000.000,-

REKAPITULASI DATA PENGADAAN SARANA PRASARANA FASILITAS GEDUNG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2019

NO.	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	JUMLAH S/D BULAN INI	%	SISA DANA	%
1	Belanja Modal	78.000.000,-	76.497.000,-	98,07	1.503.000,-	1,93

Anggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yaitu pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP, berupa 6 (Enam) Unit Laptop. Belanja tersebut diperuntukkan untuk memenuhi keperluan Hakim.

c) Pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas gedung.

Adapun kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung yang disediakan dalam DIPA tahun 2019 meliputi pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, inventaris komputer, laptop, printer, AC, dan mesin fotocopi.

**REKAPITULASI DATA PEMELIHARAAN
SARANA PRASARANA FASILITAS GEDUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TAHUN 2019**

NO	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	JUMLAH S/D BULAN INI	%	SISA DANA	%
1	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	110,851,000	110,850,889	100,00	111	0,00
2	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	226,118,000	226,117,816	100,00	184	0,00
3	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	28.000.000	28.000.000	100,00	0	0,00

d) Penghapusan dan Penetapan Status Penggunaan BMN

Bahwa berdasarkan PMK 96 /PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan, Penghapusan & Pemindahan tangganan BMN serta Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor : 115.A/BUA/SK/VI/2014, dan Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 31.A/SEK/SK/7/2015, bahwa salah satu syarat pemindahantanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara harus sudah ditetapkan Status Penggunaan BMNnya maka untuk tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengajukan penetapan status penggunaan berupa gedung dan bangunan serta Barang inventaris kurang dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) dan Penetapan status barang Rp.25.000.000 sampai Rp.100.000.000 (seratus juta). Sehingga penghapusan yang sudah diusulkan tahun 2019 tidak dapat dilanjutkan proses penghapusannya karena menunggu penetapan status penggunaan.

D. Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang bersumber dari Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA/01) Mahkamah Agung RI dengan Nomor: SP DIPA-005.01.2.526771/2019 tanggal 5 Desember 2018 untuk Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan kode satker : 526771 menerima total pagu anggaran belanja semula sejumlah Rp. 7.749.469.000 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) namun terdapat beberapa kali revisi hingga pada akhir tahun anggaran 2019, sehingga total pagu anggaran belanja setelah Revisi DIPA Ke-6 berubah menjadi sebesar Rp. 8.075.635.000 (Delapan Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Adapun mengenai Pengelolaan Anggaran DIPA Tahun 2019 di bagi menjadi 3 belanja dalam setahun yaitu sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Rekapitulasi Belanja Barang Operasional dan Non Operasional Tahun 2019

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa
1	PTUN Makassar	1.254.042.000	1.209.432.616	44.609.384

Rekapitulasi Belanja Pegawai Tahun 2019

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa
1	PTUN Makassar	6.733.693.000	6.682.430.051	51.262.949

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Rekapitulasi Belanja Modal Tahun 2019

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa
1	PTUN Makassar	78.000.000	76.497.000	1.503.000

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN

Rekapitulasi Belanja Bahan Tahun 2019

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa
1	PTUN Makassar	2.700.000	2.700.000	0

Rekapitulasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2019

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa
1	PTUN Makassar	7.200.000	5.250.000	1.950.000

Anggaran Belanja DIPA DIRJEN BADILMILTUN kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (526772) tahun 2019 sebesar Rp. 67.400.000,-
(Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Yang Selanjutnya Disingkat SIPP PTUN Makassar., Merupakan Sebuah Aplikasi Komputer Yang Memadukan Kemudahan Pengolahan Dan Pencetakan Seluruh Dokumen Perkara Dengan Pengolahan Data-Data Perkara Yang Terotomatisasi Dan Terintegrasi Berdasarkan 5 (Lima) Pola Bindalmin. Dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Peradilan. Salah satu bentuk percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan adalah dukungan teknologi informasi. Teknologi informasi yang sudah dibangun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) aplikasi yang berbasis website yang berguna bagi para pencari keadilan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan secara online pada website serta informasi yang dapat diperoleh dari website Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu www.ptun-makassar.go.id. Pengadaan server untuk aplikasi SIPP pada tahun 2015 dan sampai tahun 2019 telah dilakukan pemeliharaan dan proses update aplikasi secara berkala dari versi **3.1.5-5** menjadi **3.3.0-1** sesuai petunjuk Mahkamah Agung RI.

Berikut daftar perangkat keras (Hardware) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar :

No.	Nama Barang	Jumlah	Baik	Rusak	Keterangan
1.	Komputer (Lengkap)	30	25	5*	*Ruang Sidang
2.	Fingerprint	2	1	1	
3.	Switch	6	6	-	
4.	Kabel Jaringan LAN	±1300 M	±1000 M	±300 M	* Perlu penataan ulang

5.	Server	4	3	1	
7.	Wireless Rooter	1	1	-	
8.	Wireless	6	6	-	
9.	Printer	28	24	4	
10.	Scaner	1	1	-	
11.	Laptop/notebook	22	16	6	
12.	Webcam	1	1	-	

Berikut daftar perangkat lunak (Software) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar :

No.	Nama Barang	Jumlah	Baik	Rusak	Keterangan
1.	Aplikasi SIPP	1	1	-	
2.	TV Media	1	1	-	
3.	Touchscreen Informasi	1	1	-	
4.	ATR	1	1	-	
5.	E-SKUM	1	1	-	
6.	Aplikasi SAIBA	1	1	-	
7.	RKAKL	1	1	-	
8.	Aplikasi GPP	1	1	-	
9.	Aplikasi SPM	1	1	-	
10.	Aplikasi SIMAK	1	1	-	
11.	Aplikasi Persediaan	1	1	-	

- Publikasi Perkara (One Day One Publish)

Salah satu komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tahun 2019 yaitu publikasi perkara dan proses minuterling yang dilaksanakan 1 (satu) hari (One day Publish dan One Day Minuterling) secara konsisten sebagai wujud dari komitmen untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan informasi perkara.

F. Regulasi Tahun 2019

Seiring dengan berpacunya pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah, dan sesuai grand design reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI juga telah melakukan reformasi birokrasi. Sejak tahun 2012 Mahkamah Agung mencanangkan reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja yang berada dibawahnya, termasuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Oleh Mahkamah Agung setiap tahun dilakukan monitoring dan supervisi ke seluruh satuan kerja. Pada tahun 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pernah dilakukan supervisi oleh tim reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI. Sehingga sampai tahun 2019 masih dilakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus. Adapun pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang meliputi 8 (delapan) area adalah sebagai berikut :

1. Area Manajemen Perubahan

Dalam melakukan perubahan manajemen, pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyampaikan dalam rapat untuk mengubah pola pikir , dari pola dilayani menjadi pola kerja yang melayani. Selain itu juga dibentuk Tim reformasi Birokrasi, penetapan role model,penyampaian kode etik dan perilaku pegawai,pemasangan slogan anti korupsi dan tips bagi pegawai, penerapan kawasan steril pada lantai 2 (larangan bagi berperkara untuk tidak naik ke lantai 2), penyampaian questioner kepuasan pelayanan para pencari keadilan. Adapun surat Keputusan yang sudah diterbitkan tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang Tim pelaksana reformasi birokrasi.
 - b. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang Kriteria Penilaian Role Model
 - c. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang Penerapan Role Model pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
2. Area Penataan Perundang Undangan

Untuk area peraturan perundangan-undangan dilakukan dengan mengakses website untuk mengunduh peraturan yang diperlukan.

3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Yang telah dilakukan dalam penataan dan penguatan organisasi yaitu pembuatan RKT (rencana kinerja tahunan), update data sikep yang sudah mencapai 100% yang ditegaskan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang penanggungjawab dan admin SIKEP.

4. Area Perubahan Penataan Tatalaksana

Penataan Tata Laksana dilakukan dengan inovasi penyelesaian perkara melalui penyusunan SOP yang berstandar ISO, memberikan informasi status perkara melalui informasi perkara yang dapat diakses SIPP WEB, menyusun indikator kinerja utama, menyusun rencana kinerja tahunan dan program kerja, pembentukan tim pelaksana ISO dengan keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang Pengelolaan meja informasi dan pengaduan dengan Keputusan Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor tentang Pengelolaan website melalui Keputusan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan juru bicara (petugas humas)

5. Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan Sistem manajemen SDM dilakukan dengan pengiriman pegawai dalam mengikuti diklat sesuai tupoksinya, pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi masing masing pegawai, Pengusulan pengisian jabatan structural, Rotasi pegawai internal Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, melaksanakan promosi jabatan mealui tim Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan melalui keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta merapikan file pegawai

6. Area Perubahan Penguatan Pengawasan

Penguatan Pengawasan dilakukan dengan pengawasan langsung oleh wakil ketua dan hakim pengawas bidang pengawasan atasan langsung pegawai. Pengawasan disiplin pegawai melalui teguran lisan.

7. Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dilakukan dengan penyusunan laporan bulanan perkara, keuangan, PNBP, laporan BMN melalui neraca bulanan, penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai, penyusunan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, penetapan Kinerja, Pernyataan Kinerja pejabat struktural yang dimuat dan diupload pada website Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pengelolaan website yang aktif dan up to date, termasuk upload realisasi anggaran.

8. Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sesuai dengan SK KMA nomor : 026/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yaitu adanya sarana prasarana meja informasi dan pengaduan, penetapan jam sidang, penetapan area steril, pengelolaan kebersihan, pengelolaan keamanan. Pada tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tetap mempertahankan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan telah mendapatkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2018 yang diserahkan pada tanggal 13 Juli 2018 sebagai salah satu komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan.

BAB IV

PENGAWASAN

A. Internal

Bahwa sistem Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terdiri dari 3 (tiga) bagian besar yaitu :

1. Pengawas Melekat.

Pengawasan melekat dalam unit Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di bawah naungan Mahkamah Agung RI adalah Pengawasan secara Struktural yang melekat dalam suatu organisasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum angka I huruf a Intruksi Presiden No. 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawas melekat yaitu sebagai berikut : “Pengawas melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai sifat Pengadilan yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan secara Prefensif atau Represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”, dalam sistem Pengawasan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bahwa Pengawasan melekat dilakukan secara berjenjang yaitu, Ketua melaksanakan Pengawasan secara Umum dan sebagai koordinator Pengawas yang dilakukan oleh Ketua, adapun Pengawas tingkat Kepaniteraan dan Kesekretariatan kebawah dilakukan sesuai dengan tingkat jabatan yang diembannya.

2. Pengawasan Fungsional.

Dengan Hakim Pengawas bidang di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang Penunjukkan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Pengawas Bidang .

Sedangkan bidang pengawasannya meliputi : Bidang Kepaniteraan Perkara , bidang Kepaniteraan Muda hukum, Bidang kesekretariatan yang terdiri dari Sub.bagian umum dan keuangan, kepegawaian Ortala serta PTIP. Pelaksanaan Pengawasan itu terbagi menjadi 6 tim yang beranggotakan dua orang hakim.

Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai penanggung jawaban tugas-tugas yang dilaksanakan.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat mempelajari hasil-hasil yang dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja Aparat Peradilan yang dipimpinnya guna untuk memperbaiki tugas-tugas aparat Peradilan untuk mewujudkan Peradilan yang modern sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI. Adapun Pembinaan dan Pengawasan dari tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah dilakukan oleh hakim tinggi pengawas bidang.

B. Evaluasi

Bahwa hasil dari pengawasan melekat yang langsung dilaksanakan oleh Ketua sebagai koordinator Pengawasan disampaikan melalui rapat Bulanan setiap Awal Bulan sehingga dapat segera dilakukan penyelesaian pada Bulan berikutnya dan dievaluasi kembali.

Pengawasan Bidang Pos bantuan Hukum telah dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan dilakukan pertemuan untuk penyampaian hasil pengawasan sehingga segera dilakukan perbaikan.

Hasil Pengawasan dari dari Tingkat Banding disampaikan dan sudah ditindaklanjuti. Penanganan pengaduan yang diajukan pada lembaga Peradilan dapat berasal dari berbagai sumber antara lain :

1. Pengaduan masyarakat (pelayanan publik).

Pengaduan masyarakat ini melalui meja Pengaduan yaitu pengaduan langsung oleh masyarakat (pengacara), mengenai kekurangan pelayanan Aparat Peradilan terhadap pelayanan masyarakat pencari keadilan dan pengaduan online yang disediakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau melalui email : pengaduan@gmail.com sehingga dengan adanya pengaduan tersebut maka sebagai Aparat Peradilan harus menjunjung Tinggi supremasi hukum sebagai bahan evaluasi tugas-tugas pokok.

2. Pengaduan Internal

Pengaduan Internal yaitu Pengaduan yang ditinjau terhadap Aparat Peradilan dan diajukan oleh warga Peradilan itu sendiri. Untuk mengevaluasi pelayanan internal terhadap Pegawai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerapkan Struktur Organisasi sesuai dengan Perma No 7 Tahun 2015 dan telah menetapkan serta melakukan Evaluasi terhadap Standar Operation Prosedur (SOP) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepada setiap pegawai.
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan Pelayanan Publik yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- c. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terus berupaya dengan memberikan Pelayanan dengan cara meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, dengan terus mengikutsertakan Pelatihan – pelatihan atau Diklat – diklat yang ada serta melakukan Mutasi pada bagian tertentu untuk memperkuat beberapa area yang dirasa masih kurang.
- d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terus diperbaiki. Terdapat beberapa penambahan Ruang dan Fasilitas yang disediakan untuk mengakomodir kenyamanan para pencari keadilan.
- e. Dipa Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA/01) Mahkamah Agung RI dengan Nomor: SP DIPA-005.01.2.526771/2019 tanggal 5 Desember 2018 untuk Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar dengan kode satker : 526771 menerima total pagu anggaran belanja semula sejumlah Rp. 7.749.469.000 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) namun terdapat beberapa kali revisi hingga pada akhir tahun anggaran 2019, sehingga total pagu anggaran belanja setelah Revisi DIPA Ke-6 berubah menjadi sebesar Rp. 8.075.635.000 (Delapan Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan Realisasi sebesar 7.976.313.369 atau sebesar 98,77%

- f. Anggaran Belanja DIPA DIRJEN BADILMILTUN kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (526772) tahun 2019 sebesar Rp. 67.400.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*). sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 57,195,000,- (*lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*). atau sebesar 84,86 %.
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2019 telah dilaksanakan dengan 8 area perubahan dan telah Meraih sertifikat ISO 9001:2015 pada tahun 2017, hal ini dilakukan untuk meningkatkan sasaran mutu pada pelayanan pemerintahan serta bidang kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.
- i. Penata usahaan bagian kepegawaian, dan Ortala, bagian keuangan dan umum, dan bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan telah dilaksanakan

dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.

- j. Kekuatan pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan karena masih adanya tugas rangkap yang dilaksanakan untuk pelayanan. Tenaga teknis yustisial : Hakim dan Panitera Pengganti , tenaga pelaksana pelayanan/staf untuk kasir, bagian pendaftaran, serta staf kesekretariatan.
- k. Pelaksanaan implementasi Teknologi Informasi dan transparansi peradilan sudah dengan adanya website, pembacaan putusan secara Live, pengaduan secara online, penyediaan sarana touch screen, meja informasi dan Proses Peradilan secara elektronik (e-Court dan e-Litigasi).

B. Saran

- a. Perlunya penambahan sumber daya manusia (SDM) tenaga teknis hakim, panitera pengganti serta pelaksana khususnya lulusan Teknologi Informasi, Perpustakaan, Komunikasi, Ekonomi Akuntansi.
- b. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimohon untuk memberikan anggaran pembangunan gedung kantor baru agar dapat meningkatkan fungsi pelayanan dan kenyamanan para pencari keadilan serta seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
- c. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimohon mengupayakan peningkatan anggaran belanja barang terutama untuk mata anggaran belanja operasional dan non operasional serta anggaran belanja modal untuk memenuhi keperluan sarana dan prasarana Pengadilan Tata

Usaha Negara Makassar.

- d. Pembinaan dan pelatihan kepada Hakim dan pegawai perlu terus-menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil menjalankan bidang tugasnya dan berakhlak mulia).
- e. Dengan telah diterimanya sertifikat ISO dan Akreditasi Penjaminan Mutu kepada seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar disarankan lebih meningkatkan kinerja, disiplin, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya masing-masing untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Makassar, 02 Januari 2019

Ketua



JAMRES SARAAN, SH.,MH
NIP. 196408161991031003